

PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

by Hendra Setiawan

Submission date: 30-Aug-2019 12:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 1165168656

File name: Artikel_Hendra_Setiawan_21114163_5AK5_2.docx (83.94K)

Word count: 3019

Character count: 19956

PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

(Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)

Pembimbing :

Dr. Ony Widilestariningtyas , SE., M.Si., Ak., CA

Oleh :

Hendra Setiawan Nurdin

21114163

Pogram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Komputer Indonesia

Email : hendrasn02@gmail.com

ABSTARCT

This research was conducted on 17 Regional Work Units of the City of Bandung. The phenomenon that occurred was that the City of Bandung received a Fair Opinion with Exception (WDP) from the West Java Representative Audit Board (BPK) related to the reasonableness of financial statement information. In submitting the 2017 TA Examination Report (LHP).

The purpose of this study is to obtain the truth of the influence of the implementation of internal control systems and government accounting standards on the quality of local government financial reports 17 Regional Work Units of the City of Bandung. The method used in this research is descriptive and verification methods. The unit of analysis in this study is an employee of the Regional Financial Management Agency with fifty-one respondents. The

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan (Dadang Suwanda, 2015:60). Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi akuntansi yang berguna untuk pengambilan keputusan (Erlina Rasdianto, 2015:20). Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

statistical tests used are validity and reliability tests. Data analysis techniques using SEM Partial Least Square (PLS) analysis with the help of SmartPLS software.

The results showed that the application of the Internal Control System had a significant effect on the quality of the Regional Government Financial Statements and the Government Accounting Standards had a significant effect on the Quality of the Regional Government Financial Statements in the Regional Work Unit of the City of Bandung

Keywords: *Internal Control System, Government Accounting Standards ,Quality of Local Government Financial Report.*

memenuhi tujuan, keempat karakteristik merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Mursyidi, 2013:47).

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan dilaksanakan oleh BPK, dengan demikian BPK akan melaksanakan pemeriksaan dan pengambil keputusan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, BPK sebagai pemeriksa yang independen akan melakukan hasil

pemeriksaan sesuai dengan standar normatif pemeriksaan BPK yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah (Dadang Suwanda 2015:85). Opini yang diberikan BPK terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi WTP (wajar tanpa pengecualian), WDP (wajar dengan pengecualian) serta Advers (pendapat tidak wajar) dan Disclaimers (tidak diberikan pendapat) (M Yusuf, 2015:2).

Dalam akuntansi, pengendalian internal yang berlaku dalam organisasi/instansi merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan yang diauditnya, auditor meletakkan kepercayaan atas efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material (Mardiasmo, 2004:105).

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas (Adhi dan Suhardjo, 2013:4).

Adapun memahami penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pihak kementerian/instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif, perlu memahami konsep pengendalian internal antara manajemen, staf, internal auditor dan eksternal auditor. Hal tersebut perlu diperhatikan karena sesuai dengan amanah pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan atas kegiatan pemerintah. Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian

internal pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang (Udiyanti, dkk.,2014).

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi Pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian SAP merupakan syarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Basti:6, 2010).

Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan sistem pengendalian internal (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan laporan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dari fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat (Mardiasmo, 2004:103)

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (Nurlaila, 2014).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas laporan keuangan yang baik, karena merupakan laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Udiyanti, dkk.,2014).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik **“PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH”**.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji besarnya pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung Barat.
- 2) Untuk mengkaji besarnya pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung.

II. 5ajian Pustaka

A. Sistem Pengendalian Internal

Mahmudi (2016:251) menjelaskan sistem pengendalian internal adalah proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mahmudi (2016:253) dan Nuramalia (2017:181) menguraikan karakteristik sistem pengendalian internal sebagai berikut:

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Pendelagasian tugas dan wewenang
4. Perwujudan peran aparat pengawasan internal yang efektif
5. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
6. Pengendalian fisik dan aset
7. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu
8. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal
9. pemantauan

B. Standar Akuntansi Pemerintahan

Baldric Siregar (2015:72) bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi Isi dari PSAP 11 mengenai penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Operasional
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Neraca

- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

C. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Dwi Prastowo (2015:5) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dwi Prastowo (2015:5) dan Dadang Suwanda (2015:71) berikut ini adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kualitas yang di kehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

III. Kerangka Pemikiran

A. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nuramalia dan Acmad Fauzi (2017:180) Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang didalamnya mengandung sistem pengendalian internal yang memadai, Sistem pengendalian internal untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai melalui keandalan laporan keuangan.

B. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Ahyani (2007:60)

mengatakan bahwa, Penerapan SAP berbasis akrual memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

IV. Metodologi Penelitian

A. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 17 SKPD yang berada di Pemerintah Kota Bandung

B. Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang penulis ambil sebanyak 17 Dinas SKPD, dimana jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Hal ini penulis lakukan karena jumlah sample harus mewakili populasi (data primer) dan jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang

C. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

V. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 3,191. Nilai tersebut lebih besar dari 2,145, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya bahwa Sistem Pengendalian Internal terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD di bidang akuntansi Pemerintah Kota Bandung dengan kontribusi pengaruh sebesar 57,1%.

B. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 2,308. Nilai tersebut

lebih besar dari 2,145, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya bahwa Standar Akuntansi Pemerintah terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD di bidang akuntansi Pemerintah Kota Bandung dengan kontribusi pengaruh sebesar 41,1%.

VI. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat Hubungan yang sangat kuat dan bersifat positif artinya, setiap peningkatan Sistem Pengendalian Internal maka hal tersebut akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan begitupun sebaliknya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang didalamnya mengandung sistem pengendalian internal yang memadai, Sistem pengendalian internal untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai melalui keandalan laporan keuangan.

2. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat hubungan yang sangat kuat dan bersifat positif artinya, setiap peningkatan Standar Akuntansi Pemerintah maka hal tersebut akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan begitupun sebaliknya. Penerapan SAP berbasis akrual memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah informasi yang terbaru bagi perkembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

VII. Daftar Pustaka

Akdon dan Ridwan. 2008. *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistik*. Bandung :Alfabeta

Arikunto, S. (2013) . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Menurut Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta :UPPT STIM YKPN

Barker,et al. 2002. *Research Methods In Clinical Psychologi*. John Wiley & Son Ltd. England

Dadang Suwanda. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta : PPM

Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung : Alfabeta.

Dedi Ramdani. 2018.<https://regional.kompas.com/read/2018/05/31/10323921/ada-sejumlah-masalah-kota-bandung-gagal-lagi-raih-wtp-dari-bpk> diakses pada 20 April 2019

Dwi Prastowo. 2015. *Analisis laporan keuangan*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Menurut Erlina Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.

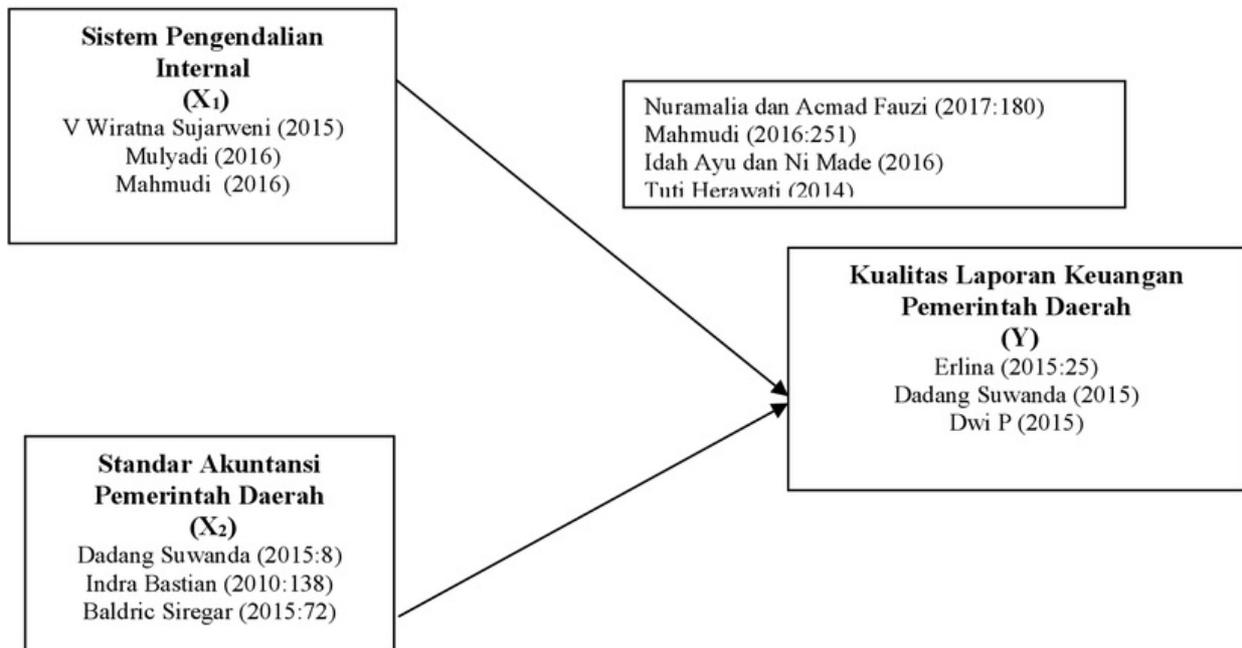
Fathur Sani. 2016. *Metode Penelitian Farmasi Komunitas dan Eksperimental* . Yogyakarta: CV Budi Utama.

Febriyani Moha, Lintje Kalangi, Jessy D.L Warongan. 2017 . Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni ISSN 2303-1174.

Guilford, J.P. 1956. *Fundamental statistic in Psychology and Education*, 3rd Ed New York McGraw-Hill Book Company, Inc.

Ida Ayu Ennysu Kiranayanti, Ni Made, Adi Erawati,, 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.2. Agustus ISSN: 2302-8556.

Lampiran



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	No Kuisioner
2 Sistem Pengendalian Internal (X ₁)	“Sistem pengendalian internal adalah proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” Mahmudi (2016 : 251)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan integritas dan nilai etika 2. Komitmen terhadap kompetensi 3. Pendelegasian tugas dan wewenang 4. Perwujudan peran aparat pengawsan internal yang efektif 5. Pengendalian atas pengelolaan sistem infromaasi 6. Pengendalian fisik dan aset 7. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 	Ordinal	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 5 6 7 8 9

		8. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting 9. pemantauan Mahmudi (2016:253)		
Standar Akuntansi Pemerintah (X ₂)	“Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah” Baldrice Siregar (2015:72)	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Operasional 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Neraca 5. Catatan Atas Laporan Keuangan Baldrice Siregar (2015:79)	Ordinal	10 11 12 13 14
1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	“kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi” Dwi Prastowo (2015:5)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dipahami 4. Dapat dibandingkan Dwi Prastowo (2015:5)	Ordinal	15 16 17 18

Tabel 4.15

Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Sistem Pengendalian Internal

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1.	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	67	85	78,8%	Baik
2.	Komitmen terhadap kompetensi	66	85	77,6%	Baik
3.	Pendelegasian Tugas Dan Wewenang	64	85	75,3%	Baik
4.	Perwujudan peran aparat pengawasan internal yang efektif	56	85	65,9%	Cukup Baik
5.	Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi	70	85	82,4%	Baik

6.	Pengendalian Fisik Dan Aset	57	85	67,1%	Cukup Baik
7.	Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu Atas Transaksi Dan Kejadian	65	85	76,5%	Baik
8.	Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting	70	85	82,4%	Baik
9.	Pemantauan	66	85	77,6%	Baik
Total		581	675	75,9%	Baik

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Tabel 4.21
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Standar Akuntansi Pemerintah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1.	Laporan Realisasi Anggaran	65	85	76,5%	Baik
2.	Laporan Operasional	65	85	76,5%	Baik
3.	Laporan Perubahan Ekuitas	68	85	80%	Baik
4.	Neraca	68	85	80%	Baik
5.	Catatan Atas Laporan Keuangan	57	85	57,1%	Cukup Baik
Total		323	425	76%	Baik

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Tabel 4.26
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1.	Relevan	67	85	85,9%	Baik
2.	Andal	57	85	67,4%	Baik
3.	Dapat dibandingkan	68	85	85,9%	Baik
4.	Dapat dipahami	65	85	83%	Baik
Total		257	340	75,6%	Baik

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Tabel 4.27
Loading Factor

Sistem Pengendalian Internal		Loading Faktor	t _{hitung}	Keterangan
X _{1.1}	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	0,893	13,957	Valid
X _{1.2}	Komitmen terhadap kompetensi	0,934	19,764	Valid
X _{1.3}	Pendelegasian Tugas Dan Wewenang	0,900	10,102	Valid
X _{1.4}	Perwujudan peran aparat pengawasan internal yang efektif	0,642	3,075	Valid
X _{1.5}	Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Infomasi	0,900	20,924	Valid
X _{1.6}	Pengendalian Fisik Dan Aset	0,698	3,778	Valid
X _{1.7}	Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu Atas Transaksi Dan Kejadian	0,982	99,570	Valid
X _{1.8}	Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting	0,874	14,514	Valid
X _{1.9}	Pemantauan	0,943	23,311	Valid

Standar Akuntansi Pemerintah		Loading Faktor	t _{hitung}	Keterangan
X _{2.1}	Laporan Realisasi Anggaran	0,797	7,558	Valid
X _{2.2}	Laporan Operasional	0,961	68,096	Valid
X _{2.3}	Laporan Perubahan Ekuitas	0,882	16,575	Valid
X _{2.4}	Neraca	0,749	4,132	Valid
X _{2.5}	Catatan Atas Laporan Keuangan	0,742	4,861	

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Loading Faktor	t _{hitung}	Keterangan
Y ₁	Relevan	0,904	17,460	Valid
Y ₂	Andal	0,603	2,198	Valid
Y ₃	Dapat dibandingkan	0,903	18,85	Valid
Y ₄	Dapat dipahami	0,977	97,429	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Tabel 4.28
AVE

2 Variabel Laten	AVE	Communality
X1. Sistem Pengendalian Internal	0,737	0,737
X2. Standar Akuntansi Pemerintah	0,756	0,756
Y. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,690	0,690

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Tabel 4.29

Cross Loading Factor

	Sistem Pengendalian Internal	Standar Akuntansi Pemerintah	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
X _{1.1}	0,893	0,824	0,835
X _{1.2}	0,934	0,936	0,928
X _{1.3}	0,900	0,860	0,897
X _{1.4}	0,642	0,666	0,635
X _{1.5}	0,900	0,836	0,868
X _{1.6}	0,698	0,749	0,718
X _{1.7}	0,982	0,961	0,977
X _{1.8}	0,874	0,816	0,868
X _{1.9}	0,943	0,907	0,931
X _{2.1}	0,791	0,797	0,782
X _{2.2}	0,982	0,961	0,977
X _{2.3}	0,874	0,882	0,903
X _{2.4}	0,698	0,749	0,718
X _{2.5}	0,631	0,742	0,644
Y ₁	0,907	0,610	0,904
Y ₂	0,564	0,524	0,603
Y ₃	0,874	0,666	0,903
Y ₄	0,982	0,711	0,977

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Tabel 4.30
Perbandingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel Laten	AKAR AVE	Korelasi Antar Variabel Laten		
		X ₁	X ₂	Y
X ₁	0,858	1,000		
X ₂	0,869	0,970	1,000	
Y	0,830	0,986	0,981	1,000

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Uji Reliabilitas

Tabel 4.31
Composite Reliability

Variabel Laten	Composite Reliability
X ₁ . Sistem Pengendalian Internal	0,916
X ₂ . Standar Akuntansi Pemerintah	0,965
Y. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,917

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Tabel 4.32
Hasil Nilai GoF

	Communality	R Square
Variabel Y	0,690	0,982
Perkalian	0,6775	
Nilai GoF	0,8321	

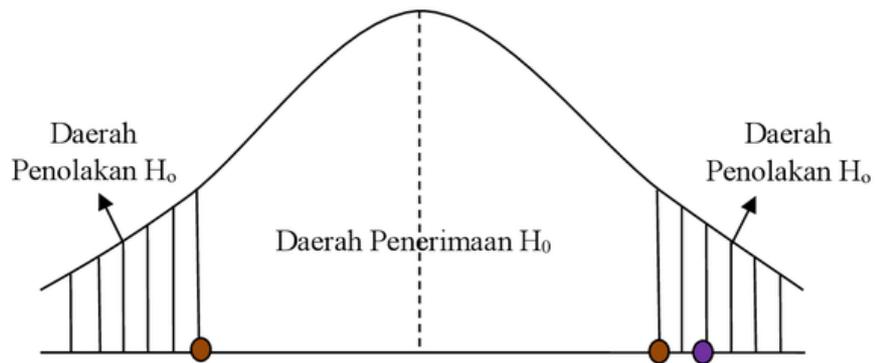
Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Tabel 4.33
Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis

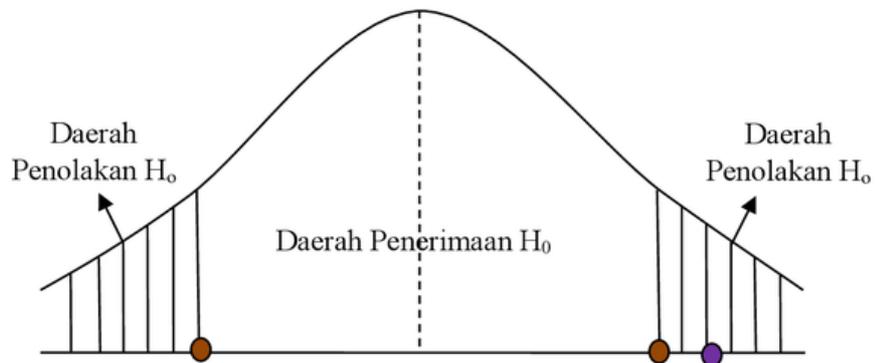
(Path Coefficients)

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STERR)
X ₁ . Sistem Pengendalian Internal -> Y. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,579	2,146
X ₂ . Standar Akuntansi Pemerintah -> Y. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,419	2,308

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS



7

Gambar 4.4**Kurva Uji Hipotesis Variabel X_1 terhadap Y** **Gambar 4.5****Kurva Uji Hipotesis Variabel X_2 terhadap Y**

PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

4%

2

[Submitted to Universitas Muria Kudus](#)

Student Paper

4%

3

adoc.tips

Internet Source

3%

4

repository.unpas.ac.id

Internet Source

3%

5

[Submitted to Universitas Sam Ratulangi](#)

Student Paper

2%

6

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

2%

7

www.scribd.com

Internet Source

2%

8

id.123dok.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On